

Journal of International Relations Diponegoro

Volume 10 Issue 2 Year 2025 Page 16-33

**PENGARUH TIPE KEPEMIMPINAN DAN ORIENTASI
PRESIDEN JOKOWI TERHADAP KEBIJAKAN HILIRISASI
MINERAL BAUKSIT TAHUN 2019-2024**

Received: 10th July 2025; Revised: 23rd September 2025

Accepted: 25th November 2025

Ghari Fazulur Rahman Nur Hamjah

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Diponegoro

gharifnh123@gmail.com

Abstrak

Larangan ekspor bauksit mentah merupakan salah satu terobosan Jokowi dalam upayanya untuk hilirisasi industri minerba. Meskipun sempat mengalami penuntutan oleh Uni Eropa kepada WTO pada saat pemberlakuan larangan ekspor nikel mentah, Presiden Jokowi tetap teguh untuk melakukan hilirisasi guna meningkatkan nilai jual dan mencapai kedaulatan sumber daya alam. Jokowi tetap melanjutkan programnya tersebut dan percaya bahwa hilirisasi dapat membawa Indonesia menjadi negara maju. Penelitian Ini bertujuan untuk menganalisis faktor idiosinkratik Presiden Jokowi dalam pengambilan kebijakan perdagangan internasional Indonesia mengenai larangan ekspor bijih bauksit guna menjadi salah satu langkah dalam mewujudkan hilirisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan idiosinkratik Margaret G Hermann melalui data yang diperoleh dari analisis konten di internet. Hasil dari penelitian ini berdasarkan teori Idiosinkratik Margaret G Hermann, menunjukkan bahwa kebijakan larangan ekspor bauksit dan hilirisasi yang diimplementasikan Presiden Jokowi mencerminkan bahwa beliau memiliki karakteristik kepribadian dengan bentuk tipe agresif dan berorientasi independen namun tetap menunjukkan keterbukaan terhadap investasi asing dalam pembangunan smelter dan infrastruktur pendukung industri yang mencerminkan adanya fleksibilitas dalam pendekatan kebijakan luar negerinya. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dapat melakukan kajian lebih mendalam dengan memperluas objek studi kepada pemimpin lain dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia serta melakukan kajian berbasis data kuantitatif juga eksplorasi lebih lanjut mengenai respons internasional terhadap kebijakan ini guna memberikan pemahaman lebih komprehensif mengenai dinamika perdagangan global dan diplomasi ekonomi Indonesia.

Kata kunci: idiosinkratik, Presiden Jokowi, bauksit, hilirisasi, perdagangan internasional, kebijakan luar negeri

Abstract

The raw bauxite export ban is one of Jokowi's breakthroughs in his efforts to downstream the mineral and coal industry. Despite being prosecuted by the European Union to the WTO at the time of the implementation of the raw nickel export ban, President Jokowi remains steadfast downstream to increase selling value and achieve natural resource sovereignty. Jokowi continues his program and believes that downstreaming can bring Indonesia into a developed country. This study aims to analyze President Jokowi's idiosyncratic factors in making Indonesia's international trade policy regarding the bauxite ore export ban as one of the steps in realizing downstreaming. This research uses a qualitative method with Margaret G Hermann's idiosyncratic approach through data obtained from content analysis on the internet. The results of this study based on Margaret G Hermann's Idiosyncratic theory, show that the bauxite export ban and downstreaming policies implemented by President Jokowi reflect that he has personality characteristics with an aggressive type and independent orientation but still shows openness to foreign investment in smelter construction and industrial supporting infrastructure which reflects flexibility in his foreign policy approach. For future research, it is recommended to conduct a more in-depth study by expanding the object of study to other leaders in the context of Indonesia's foreign policy and conducting quantitative data-based studies as well as further exploration of international responses to this policy to provide a more comprehensive understanding of the dynamics of global trade and Indonesia's economic diplomacy.

Keywords: *idiosyncratic, President Jokowi, bauxite, downstreaming, international trade, foreign policy*

PENGANTAR

Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam melimpah, bergantung pada sektor bahan mentah, salah satunya adalah bauksit yang menjadi bahan baku utama produksi aluminium. Pada tahun 2022, Indonesia menempati peringkat kelima dunia sebagai produsen bauksit dengan produksi sekitar 21 juta metrik ton kering (Databoks, 2023). Presiden Jokowi menerapkan kebijakan hilirisasi bauksit, yaitu mendorong pengolahan bijih bauksit menjadi berbagai macam produk bernilai tambah tinggi yang dapat menghasilkan keuntungan lebih besar bagi Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, diberlakukan kebijakan larangan ekspor bauksit yang mulai berlaku pada 10 Juni 2023 didasarkan pada UU No. 3 Tahun 2020 dan Pasal 102 UU Minerba, yang mewajibkan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri (Pusat Analisis Anggaran & Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI, 2024).

Sebelumnya, kebijakan serupa diterapkan pada nikel mentah, yang memicu gugatan Uni Eropa ke WTO pada November 2019 karena dianggap melanggar ketentuan WTO yakni pada Pasal XI.1 GATT 1994 dan dianggap tidak adil karena memiliki dampak negatif bagi industri baja Eropa dikarenakan keterbatasan terhadap akses bijih nikel yang diakibatkan oleh kebijakan Indonesia tersebut. Walaupun Indonesia kalah dalam gugatan tersebut pada Oktober 2022, larangan ekspor bauksit tetap diberlakukan sebagai langkah tegas Presiden Jokowi dalam mendukung hilirisasi industri nasional sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 mengenai hilirisasi mineral.

Dilansir dari laman publikasi Presiden RI, menurut Presiden Jokowi, kebijakan ini bertujuan meningkatkan kedaulatan sumber daya alam, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan negara. Larangan ekspor nikel sebelumnya

terbukti efektif, dengan nilai ekspor nikel meningkat dari Rp 17 triliun pada 2014 menjadi Rp 326 triliun pada 2021. Jokowi pun menegaskan komitmennya untuk memperkuat industri dalam negeri dengan mengurangi ekspor bahan mentah dan mendorong hilirisasi SDA.

Di samping itu, terdapat aspek-aspek yang perlu diperhatikan pemerintah untuk mendukung keberjalanan hilirisasi bauksit, di antaranya: (1) masih terbatasnya kapasitas smelter untuk hilirisasi seluruh hasil bijih bauksit di Indonesia, (2) izin pembangunan pembangkit listrik yang sulit, dan (3) masih kurangnya dalam aspek promosi perdagangan terutama pada perluasan perjanjian kerja sama dagang.

Hilirisasi industri di Indonesia bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan memperkuat ekonomi nasional. Konsep ini mulai diperkenalkan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai bagian dari strategi pembangunan industri berbasis sumber daya alam (DetikNews, 2024). Kemudian ditekankan pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi (2014-2019) dengan visi dan misinya yang dikenal dengan “Nawa Cita”, yang berfokus terhadap pembangunan infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memperbaiki tata kelola pemerintahan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2015). Meskipun saat itu fokus utamanya masih pada industri maritim dan perikanan, hilirisasi masuk ke dalam salah satu agenda pembangunan ekonomi (Bareksa, 2015). Pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi (2019-2024), hilirisasi diperkuat secara agresif dengan menetapkan larangan ekspor mineral mentah, terutama dapat dilihat pada saat pemberlakuan kebijakan larangan ekspor nikel mentah pada tahun 2020.

Kebijakan hilirisasi mineral sejalan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, yang diproyeksikan sebagai salah satu prioritas utama untuk memperkuat struktur industri nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Keberjalanan kebijakan ini tidak terlepas dari tantangan dari domestik dan internasional, termasuk gugatan dari Uni Eropa di WTO terkait larangan ekspor nikel. Meskipun menghadapi berbagai kecaman, Presiden Jokowi tetap konsisten melanjutkan hilirisasi, termasuk larangan ekspor bauksit yang mulai berlaku pada Juni 2023. Dalam konteks politik luar negeri, kebijakan hilirisasi dapat dilihat sebagai bagian dari strategi ekonomi nasional yang lebih luas, yang mencerminkan karakteristik kepemimpinan Jokowi sebagai seorang aktor rasional.

Dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, model aktor rasional memiliki peran sentral. Menurut Paul MacDonald, pendekatan model aktor rasional sering dianggap sebagai kandidat paling logis untuk menjadi teori universal dalam menjelaskan perilaku politik dan sosial. Hal ini disebabkan oleh asumsi dasarnya yang sederhana dan intuitif, yakni bahwa individu memiliki kecenderungan untuk mengintegrasikan berbagai subbidang ilmu politik. Model ini juga mengharuskan aktor rasional untuk menganalisis berbagai alternatif beserta konsekuensinya sebelum memilih keputusan yang dapat memberikan manfaat optimal dalam proses pembuatan kebijakan (Mintz & Derouen, 2010).

Pendekatan aktor rasional juga menekankan bahwa pemimpin memiliki peran utama dalam mengidentifikasi masalah dan menentukan kebijakan luar negeri. Kebijakan suatu negara seringkali dipengaruhi oleh cara pemimpin menafsirkan situasi politik global sesuai dengan perspektif pribadinya. Jika seorang pemimpin memiliki

kekuasaan besar, keputusan yang diambil lebih bergantung pada preferensinya sendiri dibanding kesepakatan dengan aktor politik lainnya (Mintz & Derouen, 2010).

Sebagai kepala negara dan pemerintahan, Presiden Jokowi memiliki kewenangan utama dalam menentukan arah kebijakan strategis, termasuk kebijakan ekonomi internasional seperti larangan ekspor bauksit. Berdasarkan Konstitusi Indonesia dan peraturan perundang-undangan, Presiden bertanggung jawab untuk menjaga kepentingan nasional dan kedaulatan sumber daya alam Indonesia seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 4 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Ini berarti Presiden memegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam menjalankan pemerintahan. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 3 menyebutkan bahwa kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa Jokowi berperan sebagai pengambil keputusan terakhir yang menetapkan apakah kebijakan larangan ekspor bauksit akan diterapkan atau tidak, berdasarkan masukan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Sebagai kepala pemerintahan yang memegang kendali tertinggi dalam pengambilan kebijakan ekonomi dan industri, analisis terhadap kepribadian Jokowi menjadi relevan untuk memahami bagaimana keputusan strategis tersebut diambil.

METODE RISET

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan pendekatan induktif, interpretatif, dan naturalistik untuk memahami orang, kasus, fenomena, situasi sosial, dan proses dalam kondisi yang alamiah, dimana peneliti memiliki peran utama dalam pengumpulan dan interpretasi data (Zuchry Abdussamad, 2021). Penelitian ini akan menganalisis konten sebagai teknik analisisnya. Analisis konten merupakan suatu metode penelitian dengan meneliti artefak komunikasi sosial, termasuk data tekstual, program televisi, foto, film, dan bentuk, bentuk lainnya (Berg & Lune, 2012:354 dalam Bakry, 2017: 73). Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis bahasa untuk memahami dan memberi penjelasan mengenai tindakan seorang pemimpin pemerintahan. Secara khusus, analisis konten ini bersumber dari data primer berupa transkrip pidato kenegaraan, data dari kementerian dan lembaga yang terkait.

PEMBAHASAN

Faktor Idiosinkratik Presiden Jokowi dalam Pengambilan Kebijakan Larangan Ekspor Bauksit

Analisis pengambilan kebijakan larangan ekspor bauksit pada penelitian ini dapat dijelaskan oleh enam karakteristik pribadi pemimpin menurut Hermann (1980), antara lain (1) kebutuhan akan kekuasaan, (2) kompleksitas konseptual, (3) ketidakpercayaan terhadap aktor lain, (4) nasionalisme, (5) keyakinan untuk mengendalikan peristiwa, dan (6) kebutuhan akan afiliasi.

Menurut teori Margaret G. Hermann (1980), kebutuhan akan kekuasaan berkaitan dengan sejauh mana seorang pemimpin ingin mengendalikan keputusan dan

mempertahankan otoritasnya. Dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo, hal ini terlihat dari kebijakan hilirisasi yang tetap dipertahankan meskipun mendapat tekanan internasional, termasuk kebijakan larangan ekspor bauksit yang berlaku sejak Juni 2023. Sebagai presiden, Jokowi memiliki kendali penuh atas kebijakan ekonomi strategis, termasuk hilirisasi sumber daya alam. Kebijakan larangan ekspor nikel yang diterapkan sejak 2020 terbukti meningkatkan nilai ekspor nikel Indonesia dari Rp 45 triliun pada 2015 menjadi Rp 520 triliun pada 2023 (Presiden Republik Indonesia, 2024). Keberhasilan ini menjadi dasar untuk memperluas kebijakan serupa ke komoditas lain, termasuk bauksit. Jokowi meyakini hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai ekspor, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Jokowi menegaskan komitmennya dalam pidato di Sidang Tahunan MPR RI 2023:

“Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan mensejahterakan rakyatnya. Dan ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi yang sudah ratusan kali saya sampaikan, puluhan kali saya sampaikan... Kita juga harus mengembangkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya”

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat adanya frasa “Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya” menunjukkan bahwa Jokowi menetapkan arah kebijakan dengan tegas, menekankan pada transformasi ekonomi yang diinginkan. Kata “harus” mencerminkan sikap dominan dalam menetapkan visi nasional. Pernyataan “melalui hilirisasi yang sudah ratusan kali saya sampaikan, puluhan kali saya sampaikan...” menegaskan peran sentral Jokowi dalam mendorong agenda hilirisasi. Pengulangan ini mengindikasikan bahwa ia ingin memastikan kebijakan ini diinternalisasi oleh pemangku kepentingan, menegaskan pengaruhnya dalam mengarahkan kebijakan nasional dan pernyataan “Kita juga harus mengembangkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya” mencerminkan visi Jokowi sebagai pemimpin yang ingin mempengaruhi arah kebijakan ekonomi secara luas. Ia tidak hanya menetapkan kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data dari The Reform Initiatives (TRI) Indonesia menunjukkan bahwa sektor manufaktur yang menjadi fokus hilirisasi telah menyerap lebih dari 19,29 juta tenaga kerja pada 2023, meningkat dari 15,62 juta pada 2014 (Kompas, 2024). Namun, menurut Rosan Roeslani, penyerapan tenaga kerja masih bisa ditingkatkan karena hilirisasi belum sepenuhnya mencapai tahap industrialisasi lanjutan (VIVA.co.id, 2025).

Jokowi menunjukkan ketegasannya dalam mempertahankan kebijakan hilirisasi meskipun mendapat tekanan global. Dalam pidatonya di Dies Natalis Unpar 2023, ia menyatakan:

“Awal-awal memang kita disempot oleh negara-negara lain, nggak papa kalau hanya disempot. Kita diam, dibawa ke WTO, nggak apa-apa kita dibawa ke WTO. Kita punya argumentasi juga kalau kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya untuk rakyat kita.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Jokowi tidak gentar menghadapi kritik dan tekanan hukum di tingkat global. Ketika Indonesia kalah dalam gugatan Uni Eropa di WTO terkait larangan ekspor nikel, ia tetap mempertahankan kebijakan hilirisasi dan mengajukan banding untuk memperpanjang waktu dalam memperkuat regulasi domestik serta menarik lebih banyak investasi. Dalam Mandiri Investment Forum 2023, ia menegaskan:

“Kita kemarin digugat, ngga takut, kok yang lain takut semua. Digugat ya siapkan lawyer yang baik. Tapi kita kalah. Kalah kita, nikel ini sudah kalah. Terus kalau sudah kalah gimana? Ya terus aja hilirisasi, kenapa kalah. Banding, meskipun gatau menang atau kalah nanti kalau banding. Kalah ya tetep terus, barangnya sudah jadi, industrinya sudah jadi, ekosistemnya sudah jadi. Jangan mundur! Kalau mundur sudah lah, jangan berharap kita ini jadi negara maju.”

Sikap ini menunjukkan bahwa Jokowi ingin tetap mengendalikan kebijakan nasional tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal. Hermann (1999) menyebutkan bahwa pemimpin dengan kebutuhan akan kekuasaan tinggi cenderung mengambil keputusan tegas dan agresif dalam menghadapi tantangan eksternal, sebagaimana yang dilakukan Jokowi dalam kebijakan hilirisasi.

Larangan ekspor bauksit yang berlaku sejak Juni 2023 merupakan bagian dari strategi hilirisasi untuk memastikan bahwa Indonesia memperoleh manfaat maksimal dari sumber daya alamnya. Dalam pidatonya di Indonesia Economy Outlook 2023, Jokowi menyampaikan:

“Dulu ekspor bahan mentah nikel hanya menghasilkan 1,1 miliar, tahun ini perkiraan saya sudah melebihi 30 miliar USD, tahun 2022. Dari 1,1 melompat ke 30 miliar US dollar. Berapa lompatan nilai tambah itu yang kita dirugikan berpuluh-puluh tahun. Pajak tidak kita dapat, kalau kita ikut memiliki dividen juga ga dapet, royalti juga ga dapet, ekspor juga ga dapet, pembukaan lapangan kerja kita juga ga dapet, ngga dapet apa-apa, inilah yang harus dihentikan. Dan hari ini akan kita tambah lagi, kalau kemarin stop nickel, hari ini nanti akan kita umumkan lagi satu komoditas yang kita miliki (bauksit).”

Dari pernyataannya di atas, dapat dilihat Jokowi memberi penegasan bahwa ekspor bahan mentah yang terus dilakukan tanpa adanya pengolahan di dalam negeri menyebabkan kerugian besar bagi Indonesia dalam jangka panjang. Pernyataan “inilah yang harus dihentikan” dan “hari ini akan kita tambah lagi” menunjukkan sikap tegas dan determinasi dalam menentukan arah kebijakan. Ia menekankan bahwa keputusan

penghentian ekspor nikel sebelumnya telah menghasilkan keuntungan yang signifikan, sehingga kebijakan serupa akan diterapkan terhadap bauksit. Dengan menyatakan bahwa Indonesia selama ini mengalami kerugian akibat ekspor bahan mentah (“Berapa lompatan nilai tambah itu yang kita dirugikan berpuluh-puluh tahun”) serta menyoroti manfaat yang kini diperoleh (“tahun ini perkiraan saya sudah melebihi 30 miliar 75 USD”) dari kebijakan hilirisasi nikel, Jokowi memperkuat legitimasi atas kontrolnya dalam menentukan kebijakan ekonomi nasional. Berdasarkan teori Hermann (1980), pemimpin dengan kebutuhan akan kekuasaan tinggi cenderung mengambil kebijakan yang memberikan kontrol penuh terhadap sumber daya strategis. Hal ini terlihat dari bagaimana Jokowi mempertahankan kebijakan hilirisasi meskipun menghadapi berbagai tantangan internasional.

Kompleksitas konseptual menurut Hermann (1980) mengacu pada kemampuan pemimpin dalam memahami berbagai aspek kebijakan yang diambil serta mempertimbangkan dampak ekonomi, politik, dan sosial dari kebijakan tersebut. Pemimpin dengan kompleksitas konseptual tinggi mampu mengintegrasikan berbagai variabel dalam pengambilan keputusan, mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, serta menyesuaikan kebijakan dengan perubahan lingkungan domestik maupun internasional. Dalam konteks kepemimpinan Jokowi, kompleksitas konseptual ini tercermin dalam kebijakan larangan ekspor bauksit yang diberlakukan sejak Juni 2023. Jokowi tidak hanya melihat hilirisasi sebagai strategi ekonomi, tetapi juga sebagai langkah fundamental dalam membangun struktur industri berkelanjutan, meningkatkan daya saing global, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Jokowi menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap kebijakan hilirisasi, sebagaimana terlihat dalam berbagai pidatonya yang menekankan pentingnya transformasi ekonomi dari ekspor bahan mentah menuju pengolahan dalam negeri. Dalam pidato kenegaraan tahun 2023, beliau menegaskan bahwa Indonesia harus mampu mengolah sumber daya sendiri untuk menciptakan nilai tambah dan keberlanjutan ekonomi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Jokowi memahami hilirisasi tidak hanya dari perspektif ekonomi, tetapi juga dalam aspek sosial dan keberlanjutan sumber daya. Selain itu, Jokowi juga menyadari pentingnya diversifikasi industri, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekosistem investasi untuk mendukung keberlanjutan hilirisasi. Pemerintah telah meluncurkan program pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) serta Kartu Prakerja, yang hingga akhir 2023 telah menjangkau 17,5 juta peserta (INDONESIA.GO.ID, 2024).

“Di saat yang sama SDM yang telah kita persiapkan harus mendapatkan lapangan kerja untuk menghasilkan produktivitas nasional sehingga kita juga harus mengembangkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya. Yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan serta meminimalisir dampak lingkungan.”

Jokowi juga menekankan bahwa hilirisasi harus disertai dengan transfer teknologi, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, serta upaya meminimalkan dampak lingkungan. Hal ini mencerminkan pemahamannya terhadap tantangan global terkait keberlanjutan dan perubahan iklim. Salah satu contoh konkret dari implementasi kebijakan ini adalah pembangunan IMIP Training Center (ITC) di Morowali, Sulawesi Tengah, oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) pada Oktober 2024. Pusat pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja lokal, memperkuat sektor industri, serta mendukung hilirisasi sumber daya alam di Indonesia (Kabar dari Sulawesi, 2024).

Ketidakpercayaan terhadap aktor eksternal adalah salah satu karakteristik yang mempengaruhi keputusan seorang pemimpin (Hermann, 1980). Pemimpin yang memiliki ketidakpercayaan tinggi terhadap aktor asing cenderung lebih protektif dan menjaga kendali atas sumber daya nasional. Dalam kepemimpinan Jokowi, sikap ini terlihat jelas dalam kebijakan hilirisasi, terutama larangan ekspor bauksit dan respons terhadap gugatan Uni Eropa terkait kebijakan serupa pada nikel. Jokowi memandang intervensi asing sebagai tantangan dan tekanan politik yang harus dihadapi dengan strategi mandiri untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Jokowi menegaskan pentingnya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap ekspor bahan mentah, yang tercermin dalam pernyataannya pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR serta DPD RI tahun 2023:

“Jangan itu dikirim dalam bentuk raw material lagi, dalam bentuk bahan mentah lagi. Stop. Awal-awal memang kita disempot oleh negara-negara lain, nggak papa kalau hanya disempot. Kita diam, dibawa ke WTO, nggak apa-apa kita dibawa ke WTO. Kita punya argumentasi juga kalau kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya untuk rakyat kita.”

Jokowi menunjukkan bahwa meskipun mendapat tekanan dari negara lain, Indonesia harus tetap fokus pada kebijakan hilirisasi untuk membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Jokowi juga menyatakan bahwa meskipun Indonesia digugat di WTO, ia tidak takut dan tetap menjalankan kebijakan hilirisasi.

Meskipun Indonesia kalah dalam gugatan Uni Eropa di WTO terkait larangan ekspor nikel, Jokowi tetap mempertahankan kebijakan hilirisasi dan memperluasnya ke sektor lain seperti bauksit dan tembaga. Dalam pidatonya, Jokowi menyatakan:

“Dulu ekspor bahan mentah nikel hanya menghasilkan 1,1 miliar, tahun ini perkiraan saya sudah melebihi 30 miliar USD. Berapa lompatan nilai tambah itu yang kita dirugikan berpuluh-puluh tahun? Pajak tidak kita dapat, dividen tidak kita dapat, royalti tidak kita dapat, ekspor tidak kita dapat, pembukaan lapangan kerja kita juga tidak kita dapat. Inilah yang harus dihentikan.”

Pernyataan yang dibuat dalam pidato di Istana Merdeka pada 2023 tersebut menggambarkan frustrasinya terhadap sistem perdagangan internasional yang merugikan Indonesia. Jokowi melihat bahwa kebijakan hilirisasi adalah cara untuk mengubah posisi Indonesia dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi pemain utama dalam industri global.

Ketidakpercayaan Jokowi terhadap intervensi asing dalam kebijakan sumber daya alam membawa dampak positif bagi ekonomi Indonesia. Larangan ekspor nikel meningkatkan ekspor besi dan baja Indonesia, yang pada 2023 mencapai USD 26,7 miliar, menjadikan Indonesia sebagai eksportir besi dan baja terbesar keempat di dunia. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah industri domestik tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Secara keseluruhan, Jokowi menunjukkan sikap skeptis terhadap intervensi asing, memilih kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dan memperkuat ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Kebijakan hilirisasi merupakan contoh langkah proteksionis yang sejalan dengan teori Hermann (1980) mengenai pemimpin dengan tingkat ketidakpercayaan tinggi terhadap aktor eksternal.

Nasionalisme berperan penting dalam kebijakan Presiden Joko Widodo, khususnya terkait larangan ekspor bauksit dan hilirisasi. Dalam perspektif teori idiosinkratik pemimpin dengan tingkat nasionalisme yang tinggi cenderung memprioritaskan kepentingan negaranya, menolak ketergantungan pada pihak asing, serta mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan politik domestik. Nasionalisme Jokowi tercermin dalam prioritas untuk kepentingan Indonesia, mengurangi ketergantungan pada negara asing, dan memperkuat ekonomi domestik. Kebijakan hilirisasi yang diterapkan bertujuan agar Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan sumber daya dalam negeri. Jokowi berupaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap ekspor bahan mentah dan meningkatkan daya saing industri nasional. Dalam pidatonya di Istana Merdeka pada 2022, Jokowi menyatakan:

“Dari industrialisasi bauksit ini, kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp 21 triliun menjadi sekitar Rp 62 triliun. Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati oleh bangsa Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi dipandang sebagai upaya memperkuat ekonomi nasional dan memperlihatkan bahwa kebijakan ini merupakan strategi jangka panjang yang menjadi prioritas nasional. Hal ini juga mencerminkan nasionalisme ekonomi yang berfokus pada kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur larangan ekspor bahan mentah setelah tiga tahun.

Jokowi juga berupaya memperkuat sektor industri dalam negeri dengan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Dalam BNI Investor Daily Summit 2023, menyatakan:

“Peta jalan untuk minerba sudah jelas: setelah nikel, kemudian stop tembaga, kemudian stop bauksit, kemudian stop timah, dilanjutkan lagi hilirisasi di bidang perkebunan, pertanian, kelautan. Tinggal kita ini yang harus mengawal implementasi.”

Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan membangun sektor industri berbasis sumber daya alam Indonesia. Kebijakan ini melibatkan pengembangan smelter dan penggunaan produk dalam negeri untuk proyek strategis nasional.

Jokowi melihat hilirisasi sebagai langkah untuk mengubah Indonesia dari negara pengekspor bahan mentah menjadi negara dengan industri manufaktur yang maju. Dalam Indonesia Economy Outlook 2023, Jokowi mengatakan:

“Dulu ekspor bahan mentah nikel hanya menghasilkan 1,1 miliar USD, tahun ini perkiraan saya sudah melebihi 30 miliar USD. Berapa lompatan nilai tambah itu yang kita dirugikan berpuluh-puluh tahun. Pajak tidak kita dapat, dividen juga tidak kita dapat, royalti juga tidak kita dapat, ekspor juga tidak kita dapat, pembukaan lapangan kerja kita juga tidak kita dapat. Nggak dapat apa-apa. Inilah yang harus dihentikan.”

Jokowi melihat hilirisasi sebagai strategi jangka panjang untuk mengubah struktur ekonomi Indonesia dari negara pengekspor bahan mentah menjadi negara dengan industri manufaktur yang maju. Jelas terlihat bahwa hilirisasi yang dilakukan Jokowi bukan hanya soal peningkatan nilai ekspor, tetapi juga soal keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Dari analisis pernyataan-pernyataan Presiden Jokowi di atas dapat dilihat bahwa nasionalisme Jokowi dalam kebijakan larangan ekspor bauksit tercermin dalam tiga aspek utama yakni: kemandirian ekonomi, pembangunan industri dalam negeri, dan hilirisasi sebagai strategi ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan 100 karakteristik pemimpin dengan nasionalisme tinggi yang menekankan kemandirian ekonomi sebagai bagian dari kedaulatan nasional.

Keyakinan seorang pemimpin dalam mengendalikan situasi merupakan aspek penting dalam teori idiosinkratik Margaret G. Hermann. Jokowi menunjukkan karakteristik kepemimpinan ini dalam kebijakan hilirisasi yang bertujuan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap ekspor bahan mentah. Kebijakan ini mencerminkan keyakinan bahwa Indonesia mampu mengelola sumber daya alamnya sendiri untuk menciptakan nilai tambah ekonomi dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Jokowi memandang hilirisasi sebagai kebijakan strategis yang dapat meningkatkan nilai ekonomi Indonesia. Dalam Indonesia Economy Outlook 2023, menyatakan:

"Dulu ekspor bahan mentah nikel hanya menghasilkan 1,1 miliar USD, tahun ini perkiraan saya sudah melebihi 30 miliar USD. Berapa lompatan nilai tambah itu yang kita dirugikan berpuluh-puluh tahun."

Pernyataan ini menegaskan efektivitas hilirisasi dengan menggunakan data konkret sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan. Jokowi juga menyoroti bahwa kebijakan sebelumnya menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara. Data dari Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa kebijakan ini berkontribusi pada pertumbuhan sektor manufaktur berbasis mineral hingga 19%. Selain itu, Kementerian ESDM (2024) mencatat bahwa pendapatan negara meningkat dari Rp 21 triliun menjadi Rp 62 triliun setelah kebijakan hilirisasi diterapkan.

Jokowi percaya bahwa hilirisasi tidak hanya berdampak pada ekonomi domestik, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam sistem perdagangan global. Dalam pidatonya, menegaskan:

"Kita kemarin digugat, nggak takut. Kok yang lain takut semua? Digugat ya siapkan lawyer yang baik. Tapi kita kalah. Terus kalau sudah kalah gimana? Ya terus aja hilirisasi. Jangan mundur! Kalau mundur, jangan berharap kita ini jadi negara maju."

Pernyataan "Jangan mundur!" menunjukkan sikap tegas bahwa kebijakan ini harus terus berjalan meskipun menghadapi tantangan hukum di WTO. Jokowi juga menekankan bahwa hilirisasi adalah langkah strategis untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju. Keberhasilan kebijakan ini terlihat dari pertumbuhan ekspor besi dan baja Indonesia yang naik dari USD 7,4 miliar pada 2019 menjadi USD 26,7 miliar pada 2023 (Kementerian Perdagangan RI, 2024). Keyakinan Jokowi dalam mengendalikan situasi ekonomi melalui hilirisasi terbukti dari dampak nyata terhadap pertumbuhan pendapatan negara, sektor manufaktur, serta daya saing global. Kebijakan ini bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga upaya memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia di pasar internasional.

Dalam teori idiosinkratik Margaret G. Hermann, kebutuhan akan afiliasi merujuk pada kemampuan pemimpin dalam menjalin hubungan dengan aktor lain untuk mencapai tujuan nasional tanpa kehilangan kendali atas kebijakan domestik. Jokowi menunjukkan hal ini dengan menjalin kerja sama dengan investor asing dalam pembangunan industri strategis, terutama hilirisasi sumber daya alam, namun tetap mempertahankan kemandirian ekonomi melalui regulasi ketat (JDIH BPK, 2019; Peraturan Pajak, 2023).

Jokowi mengarahkan investasi asing untuk mempercepat pembangunan industri, seperti kerja sama Harita Group dengan Glencore International dalam pengembangan smelter nikel dan aluminium, serta ketertarikan Tesla dan Foxconn dalam sektor energi terbarukan (Soemanagara, 2022). Regulasi yang ketat memastikan Indonesia tetap mengendalikan sumber daya strategis. Salah satu contohnya adalah pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik dengan investasi Rp 56 triliun.

Proyek ini diproyeksikan meningkatkan penerimaan negara hingga Rp 80 triliun dan membuka ribuan lapangan kerja (INDONESIA.GO.ID, 2024; Presiden Republik Indonesia, 2024). Selain itu, proyek ini berdampak pada ekonomi lokal dengan perputaran dana Rp 2 triliun bagi pelaku UMKM serta menyerap hingga 40.000 tenaga kerja selama konstruksi dan 2.000 saat operasional (Klik Jatim, 2024; Niaga Asia, 2024). Selain Freeport, Indonesia bekerja sama dengan Tsingshan Holding Group dalam pengembangan smelter nikel di Weda Bay, Maluku Utara. Pada 2024, PT Antam mengakuisisi 30% saham PT Jiu Long Metal Industry senilai USD 102 juta untuk memperkuat kepemilikan Indonesia atas industri strategis (CNBC Indonesia, 2021).

Dalam perspektif Hermann, Jokowi memiliki kebutuhan afiliasi tinggi dengan pendekatan khas. Jokowi memanfaatkan kerja sama dengan investor asing sebagai strategi memperkuat daya saing nasional melalui transfer teknologi dan pengembangan industri domestik. Regulasi seperti kewajiban transfer teknologi dan penciptaan lapangan kerja menjadi upaya menyeimbangkan kebutuhan afiliasi dengan kendali atas sumber daya nasional. Jokowi menekankan bahwa keterlibatan asing harus dikontrol agar manfaat ekonomi dapat didistribusikan optimal kepada rakyat Indonesia. Strategi ini memastikan Indonesia tidak hanya menjadi tujuan investasi, tetapi juga pemain utama dalam industri bernilai tambah tinggi di tingkat global.

Korelasi Kepribadian Presiden Jokowi dengan Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Kebijakan luar negeri suatu negara dapat dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian pemimpin pemerintahannya (Hermann, 1980), antara lain (1) pengakuan berorientasi terhadap perubahan, (2) kemandirian/ketergantungan akan tindakan, (3) komitmen, (4) pengaruh, dan (5) umpan balik dari lingkungan.

Dalam teori idiosinkratik Margaret G. Hermann, orientasi terhadap perubahan mencerminkan keberanian pemimpin dalam mengadopsi kebijakan tidak konvensional. Jokowi menunjukkan karakteristik ini melalui kebijakan hilirisasi yang mengubah struktur ekspor Indonesia dari sekadar pengekspor bahan mentah menjadi produsen bernilai tambah tinggi. Sejak awal pemerintahannya, Jokowi menegaskan pentingnya hilirisasi dengan menerapkan larangan ekspor bahan mentah, dimulai dari nikel pada 2020 dan bauksit pada 2023. Kebijakan ini bertujuan menciptakan ekosistem industri yang lebih kuat, menarik investasi, dan membuka lapangan kerja. Pada 2023, investasi di sektor hilirisasi mencapai Rp 375,4 triliun, terutama dari pembangunan smelter nikel, tembaga, dan bauksit (Kementerian Investasi/BKPM, 2024). Jokowi menghadapi tekanan dari negara mitra dagang, seperti Uni Eropa yang menggugat larangan ekspor nikel ke WTO. Meski Indonesia kalah dalam sengketa WTO pada 2022, Jokowi tetap melanjutkan kebijakan hilirisasi dan memperluasnya ke sektor lain. Dalam Mandiri Investment Forum 2023, Jokowi menegaskan bahwa keputusan WTO tidak menghentikan perubahan kebijakan, melainkan menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan strategi jangka panjang. Kebijakan hilirisasi tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Jokowi tetap konsisten

memperjuangkan perubahan ini meskipun menghadapi tekanan eksternal. Pendekatan ini mencerminkan kepemimpinan yang visioner dan berani, sejalan dengan teori Hermann, di mana pemimpin dengan orientasi tinggi terhadap perubahan berani menantang status quo demi visi strategis jangka panjang.

Kemandirian dalam bertindak mencerminkan ketegasan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan tanpa terlalu dipengaruhi tekanan eksternal. Jokowi menunjukkan karakteristik ini melalui kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor bauksit yang tetap dijalankan meskipun mendapat tekanan dari Uni Eropa dan WTO. Jokowi menekankan bahwa kebijakan ekonomi nasional harus berlandaskan kepentingan domestik jangka panjang, bukan sekadar mengikuti aturan perdagangan global yang menguntungkan negara maju. Ketika larangan ekspor nikel diterapkan pada 2020, Uni Eropa mengajukan gugatan ke WTO. Namun, alih-alih mundur, Jokowi justru memperluas kebijakan hilirisasi dengan melarang ekspor bauksit pada 2023. Dalam Mandiri Investment Forum 2023, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan berhenti meskipun kalah di WTO:

“Kita kemarin digugat, nggak takut, kok yang lain takut semua. Digugat ya siapkan lawyer yang baik. Tapi kita kalah. Kalah kita, nikel ini sudah kalah. Terus kalau sudah kalah gimana? Ya terus aja hilirisasi, kenapa kalah. Banding, meskipun gatau menang atau kalah nanti kalau banding. Kalah ya tetep terus, barangnya sudah jadi, industrinya sudah jadi, ekosistemnya sudah jadi. Jangan mundur! Kalau mundur sudah lah, jangan berharap kita ini jadi negara maju.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Jokowi tidak tunduk pada tekanan global. Ia tetap menjalankan hilirisasi sebagai kebijakan strategis yang sudah menghasilkan industri olahan seperti Feronikel, Nickel Pig Iron, dan Stainless Steel. PT Halmahera Persada Lygend bahkan mengekspor produk olahan nikel ke China (Tempo, 2023), membuktikan bahwa ekosistem hilirisasi sudah terbentuk. Langkah ini menegaskan bahwa Jokowi tidak gentar terhadap tekanan internasional dan tetap berpegang pada visinya membangun industri dalam negeri yang mandiri. Sikap ini sejalan dengan konsep Hermann, di mana pemimpin dengan kemandirian tinggi dalam bertindak lebih mengandalkan perhitungan strategis sendiri daripada tunduk pada tekanan dari pihak luar.

Komitmen merupakan aspek penting dalam menentukan pola perilaku kebijakan seorang pemimpin. Pemimpin dengan tingkat komitmen tinggi cenderung konsisten dalam menerapkan kebijakan dan berani menghadapi tantangan domestik maupun internasional. Sejak awal kepemimpinannya, Jokowi menegaskan bahwa Indonesia harus berhenti bergantung pada ekspor bahan mentah dan membangun industri bernilai tambah tinggi. Pada 2019, pemerintah mempercepat larangan ekspor nikel dari 2022 menjadi 2020 (Suhartono & Izzati, 2019), yang memicu gugatan dari Uni Eropa ke WTO. Meskipun kalah dalam gugatan, Jokowi tetap mempertahankan hilirisasi dengan melakukan banding dan memperluas larangan ekspor ke sektor lain

seperti bauksit dan tembaga. Dalam pidatonya di Istana Merdeka (2023), Jokowi menegaskan:

“Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi, sementara industri berbasis sumber daya alam dalam negeri akan terus ditingkatkan. Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan serta pemurnian bauksit di dalam negeri.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa hilirisasi bukan kebijakan sementara, melainkan strategi jangka panjang untuk membangun kapasitas industri nasional. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor manufaktur berbasis mineral tumbuh 19% pada 2023 setelah larangan ekspor nikel diterapkan. Nilai ekspor produk olahan nikel juga meningkat dari Rp 17 triliun pada 2014 menjadi lebih dari Rp 468 triliun pada 2023 (Kementerian ESDM). Ini membuktikan bahwa hilirisasi telah membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Jokowi menunjukkan keteguhan dalam menghadapi tekanan internasional, termasuk gugatan Uni Eropa ke WTO. Dalam Mandiri Investment Forum 2023, menegaskan:

“Digugat? Siapken pengacara terbaik. Kalah? Banding. Kalau kalah lagi? Terus saja hilirisasi. Jangan mundur! Kalau mundur, jangan berharap kita ini jadi negara maju.”

Di Kongres Mahasiswa Buddhis Indonesia 2024, kembali menyatakan:

“Kalau kita melakukan sesuatu dan ditentang oleh negara negara lain, ya hadapi. Kita yakin ini benar, kita lanjutkan. Kalau kita mundur, kita rugi sendiri.”

Sikap ini menunjukkan bahwa Jokowi tidak mudah terpengaruh tekanan eksternal dan tetap mempertahankan hilirisasi sebagai strategi utama pembangunan ekonomi. Berdasarkan teori idiosinkratik Hermann, pemimpin dengan komitmen tinggi terhadap kebijakan akan tetap mempertahankan kebijakan meskipun menghadapi tantangan. Jokowi membuktikan bahwa ia memiliki keteguhan dalam memastikan hilirisasi tetap menjadi bagian integral dari strategi ekonomi Indonesia.

Kebijakan larangan ekspor bauksit yang diterapkan sejak 2023 membawa dampak besar terhadap hubungan Indonesia dengan mitra dagangnya. Berdasarkan teori idiosinkratik Margaret G. Hermann, kebijakan ini mencerminkan karakter kepemimpinan Jokowi yang memiliki tingkat ketidakpercayaan terhadap pihak luar yang cukup tinggi serta keyakinan kuat dalam mengendalikan kebijakan domestik meskipun beresiko menimbulkan ketegangan diplomatik.

Kebijakan ini mempengaruhi perdagangan dengan negara pengimpor utama, terutama China. China, sebagai tujuan utama ekspor bauksit Indonesia, sangat

bergantung pada pasokan ini untuk industri aluminium mereka. Menjelang pemberlakuan larangan, China meningkatkan impor bauksitnya sebesar 15% pada kuartal pertama 2023 dibanding kuartal sebelumnya untuk mengamankan stok sebelum kebijakan berlaku (Ekonomi Bisnis, 2023). Pada 2022, sekitar 90% ekspor bauksit Indonesia dikirim ke China (Kementerian Perdagangan RI). Berdasarkan data dari Administrasi Umum Kepabeanan China, pada 2021, China mengimpor 107 juta ton bijih bauksit, dengan 51% berasal dari Guinea, 32% dari Australia, dan 17% dari Indonesia (CNBC Indonesia, 2022). Dengan larangan ekspor ini, industri aluminium China berpotensi terdampak signifikan, sehingga tidak menutup kemungkinan China akan melakukan langkah hukum serupa seperti Uni Eropa saat larangan ekspor nikel diberlakukan. Namun, Jokowi tetap teguh mempertahankan kebijakan ini. Staf Khusus Menteri Perdagangan, Bara Krishna Hasibuan, menyatakan bahwa Indonesia siap menghadapi konsekuensi dari kebijakan tersebut (CNBC Indonesia, 2023).

Menghadapi tantangan diplomatik akibat kebijakan hilirisasi, Indonesia mengadopsi strategi diversifikasi mitra dagang. Beberapa perjanjian kerja sama baru dijalin dengan negara-negara di Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika. Salah satu langkah konkret adalah penandatanganan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Emirat Arab (IUAE–CEPA) pada 1 Juli 2022. Perjanjian ini mencakup perdagangan barang, jasa, investasi, serta kerja sama ekonomi Islam, yang bertujuan memperluas akses pasar dan memperkuat hubungan ekonomi kedua negara (Ditjen PPI RI, 2022). Selain itu, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menandatangani nota kesepahaman dengan Emirates Global Aluminium (EGA) pada 31 Maret 2022. Kerja sama ini bertujuan meningkatkan produksi aluminium hingga 400 ribu ton per tahun pada 2024, dengan penerapan teknologi peleburan modern milik EGA di smelter Inalum di Kuala Tanjung, Sumatera Utara (Antaranews, 2022).

Menurut teori idiosinkratik Hermann, kebijakan ini menunjukkan bahwa Jokowi memiliki keyakinan tinggi dalam mengendalikan kebijakan ekonomi dan tingkat ketidakpercayaan yang cukup besar terhadap sistem perdagangan internasional yang dianggap tidak selalu adil. Selain itu, ia memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kebijakan meskipun menghadapi tantangan eksternal. Dengan demikian, larangan ekspor bauksit bukan hanya kebijakan ekonomi, tetapi juga strategi besar dalam membangun kemandirian industri dan memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

Kebijakan larangan ekspor bauksit yang diterapkan sejak 2023 memicu berbagai reaksi dari lingkungan internasional, terutama dari negara-negara importir utama bauksit Indonesia. Meskipun kebijakan ini merupakan bagian dari strategi hilirisasi, respons global bervariasi, mulai dari kritik, adaptasi strategi perdagangan, hingga upaya negosiasi ulang kebijakan ekonomi. Menggunakan teori idiosinkratik Margaret G. Hermann, umpan balik internasional ini dapat dikaitkan dengan karakter kepemimpinan Jokowi, terutama dalam aspek kemandirian dalam bertindak dan keyakinan dalam mengendalikan situasi, yang turut membentuk respons negara mitra dagang.

China, sebagai importir terbesar bauksit dari Indonesia, menjadi salah satu negara yang paling terdampak. Data dari General Administration of Customs China (GACC) menunjukkan bahwa pada 2022, China mengimpor sekitar 17,8 juta ton bauksit dari Indonesia, menjadikannya pemasok terbesar kedua setelah Guinea (Reuters, 2022). Dengan diberlakukannya larangan ekspor, industri peleburan aluminium di China terpaksa mencari sumber alternatif, yang menyebabkan peningkatan impor bauksit dari Guinea dan Australia. Alih-alih menekan Indonesia secara langsung melalui jalur diplomatik atau perdagangan, China lebih memilih strategi adaptasi dengan mendiversifikasi pasokan. Sebelum kebijakan berlaku penuh, China meningkatkan impor bauksitnya sebesar 15% pada kuartal pertama 2023 sebagai upaya mengamankan stok bahan baku (Ekonomi Bisnis, 2023). Selain China, Indonesia juga menghadapi potensi gugatan seperti yang diajukan Uni Eropa terhadap larangan ekspor nikel. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah, namun Presiden Jokowi tetap konsisten mempertahankan kebijakan ini. Dalam pidatonya pada Mandiri Investment Forum 2023, ia menegaskan bahwa Indonesia akan terus melanjutkan hilirisasi meskipun menghadapi gugatan internasional (CNBC Indonesia, 2023).

Selain menghadapi tantangan dari negara mitra dagang, kebijakan hilirisasi mendorong Indonesia untuk memperluas hubungan ekonomi dengan negara lain. Salah satu langkah penting adalah penandatanganan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Emirat Arab (IUAE–CEPA) pada 1 Juli 2022 (Ditjen PPI RI, 2022). Kesepakatan ini memperluas peluang kerja sama di berbagai sektor, termasuk perdagangan dan investasi, serta membuka pasar baru bagi produk hilirisasi Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan larangan ekspor bauksit dan hilirisasi yang diterapkan Presiden Jokowi mencerminkan kepemimpinan yang agresif, mandiri, dan berorientasi pada kedaulatan ekonomi nasional. Menggunakan pendekatan idiosinkratik Margaret G. Hermann, ditemukan bahwa keputusan ini didorong oleh kebutuhan akan kekuasaan, kepercayaan diri dalam mengendalikan situasi, serta nasionalisme yang kuat. Selain itu, karakteristik Jokowi dalam pengambilan keputusan menunjukkan adanya keseimbangan antara pendekatan agresif dan fleksibilitas strategis dalam menghadapi tekanan global. Hal ini memperkaya pemahaman tentang keunikan kepribadian Jokowi yang tidak sepenuhnya dapat dikategorikan dalam satu dimensi tertentu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel jurnal ini dihasilkan atas bantuan dan dukungan dari orang tua, teman-teman, serta dosen-dosen terkasih sehingga artikel dapat diselesaikan. Tanpa bantuan dari mereka, penulis tidak akan berhasil menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Penulis berharap artikel ini dapat berguna untuk penelitian lain di kemudian hari dan juga untuk masyarakat. Konten dan isi dalam artikel sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

REFERENSI

- Adi Ahdiat. (2023). Indonesia, Negara dengan Cadangan Bauksit Terbesar ke 6 Global pada 2022. Katadata.co.id. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/pertambangan/statistik/73dc90ec2b51e58/indonesia-negara-dengan-cadangan-bauksit-terbesar-ke-6-global-pada-2022>
- Antaranews. (2022). Ekspansi produksi, Inalum teken MoU dengan perusahaan aluminium UEA. Retrieved February 26, 2025, from Antara News website: <https://www.antaranews.com/berita/2799985/ekspansi-produksiinalum-teken-mou-dengan-perusahaan-aluminium-uea>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). Produksi Barang Tambang Mineral - Tabel Statistik. Retrieved from Bps.go.id website: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTA4IzI=/produksi-barang-tambang-mineral.html>
- Berg, B. L. & Lune, H. (2017). *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. Pearson.
- CNBC Indonesia. (2021). Blak-blakan Luhut, Smelter Freeport-Tsinghsan hingga Tesla. Retrieved February 24, 2025, from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210325084119-4-232695/blak-blakan-luhut-s-melter-freeport-tsingshan-hingga-tesla>
- CNBC Indonesia. (2023). China Gak Terima Bauksit Disetop? Jokowi Siap “Perang” di WTO. Retrieved February 26, 2025, from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230303110817-4-418584/china-gak-terima-bauksit-disetop-jokowi-siap-perang-di-wto>
- CNBC Indonesia. (2022). Siap-siap, Presiden Jokowi Akan Larang Ekspor Bauksit. Retrieved March 1, 2025, from YouTube website: 145 <https://www.youtube.com/watch?v=b1T9-DqU-Iw&list=PLc9qqC8RUNN11W0hMvCCvj2TYMFqFeMMA&index=4>
- Ditjen PPI RI. (2022). IUAE–CEPA Ditandatangani: Sejarah Baru Bagi Indonesia dan Uni Emirat Arab - Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional. Retrieved February 26, 2025, from Kemendag.go.id website: <https://ditjenppi.kemendag.go.id/berita/iuae-cepa-ditandatangani-sejarah-baru-bagi-indonesia-dan-uni-emirat-arab>
- Ekonomi Bisnis. (2023). Manuver China Sebelum Larangan Ekspor Bauksit Dilakukan Indonesia. Retrieved February 25, 2025, from Bisnis.com website: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230621/44/1667660/manuver-china-sebelum-larangan-ekspor-bauksit-dilakukan-indonesia>
- Hermann, M. G. (1980). Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders. *International Studies Quarterly*, 24(1).
- Hermann, M. G. (1999). *ASSESSING LEADERSHIP STYLE: A TRAIT ANALYSIS*.
- INDONESIA.GO.ID. (2024). Indonesia.go.id - Agar Tenaga Kerja Berkualitas. Retrieved February 19, 2025, from Indonesia.go.id website: <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8638/agar-tenaga-kerja-berkualitas?lang=1>

- INDONESIA.GO.ID. (2024). Indonesia.go.id - Smelter Baru Freeport Indonesia di Gresik, Babak Baru Industri Pertambangan. Retrieved February 24, 2025, from Indonesia.go.id website:
<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8400/freeport-indonesia-s-new-smelter-in-gresik-a-new-chapter-in-the-country-s-mining-industry?lang=2?lang=1>
- JDIH BPK. (2019). PERPRES No. 34 Tahun 2019. Retrieved February 23, 2025, from Database Peraturan | JDIH BPK website:
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/123701/perpres-no-34-tahun-2019>
- Kabar dari Sulawesi. (2024, January). PT IMIP Bangun IMIP Training Center untuk Peningkatan Kualitas SDM di Morowali. Retrieved February 19, 2025, from www.KabarSelebes.co.id website:
<https://kabarselebes.co.id/berita/2024/10/03/pt-imip-bangun-imip-training-center-untuk-peningkatan-kualitas-sdm-di-morowali/>
- Kementerian Perdagangan RI. (2024). Mendag Zulkifli Hasan: Indonesia Tempati Posisi Keempat Eksportir Besi Baja Terbesar di Dunia. Retrieved February 21, 2025, from kemendag.go.id website:
<https://www.kemendag.go.id/index.php/berita/pojok-media/mendag-zulkifli-hasan-indonesia-tempati-posisi-keempat-eksportir-besi-baja-terbesar-di-dunia>
- Klik Jatim. (2024). Dampak Ekonomi Pembangunan Smelter Freeport di Gresik Hasilkan Multiplier Effect Rp2 Triliun Untuk UMKM Lokal EKONOMI & BISNIS -